



Strategi Pelaksanaan Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tukamasea Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros

Nahda Annisa¹, Aras Solong²

¹²Administrasi Publik (Universitas Islam Makassar), Makassar, Indonesia

Keywords:

BUMDes
Public Policy
Implementation Strategy
Village Economy
Village Original Income

ABSTRACT

This study aims to analyze the strategy of policy implementation and inhibiting factors in the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Tukamasea Village, Bantimurung District, Maros Regency. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that the strategy of implementing the Village-Owned Enterprises (BUMDes) policy is carried out by adjusting the village government policy to the needs of the community. This study found that Village-Owned Enterprises (BUMDes) play a very important role in the community. However, there are factors that inhibit the Village-Owned Enterprises (BUMDes) policy strategy, namely the lack of capital from the district government, the lack of support from the Decree of cooperation between the government and large entrepreneurs to set aside some capital for the development of Business Partners who have collaborated with BUMDes and are less able to compete with other products in terms of quantity or number of varied products because they have very limited business capital. The implications of this study indicate that strengthening BUMDes can improve community welfare through optimization of Village Original Income (PAD). Therefore, synergy is needed between the village government and the regional government to strengthen policies related to BUMDes management. This study aims to analyze the strategy for implementing policies and inhibiting factors in the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Tukamasea Village, Bantimurung District, Maros Regency. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that the strategy for implementing Village-Owned Enterprises (BUMDes) policies is carried out by adjusting village government policies to community needs. This study found that Village-Owned Enterprises (BUMDes) play a very important role in society. However, there are factors that inhibit the strategy for Village-Owned Enterprises (BUMDes) policies, namely the lack of capital from the district government, the lack of support from the Decree on cooperation between the government and large entrepreneurs to set aside some capital for the development of Business Partners who have collaborated with BUMDes and are less able to compete with other products in terms of quantity or number of products that vary because they have very limited business capital. The implications of this study indicate that strengthening BUMDes can improve community welfare through optimization of Village Original Income (PAD). Therefore, synergy is needed between the village government and regional government to strengthen policies related to BUMDes management.

* Corresponding Author

Email : nahdaannisa1104@gmail.com

Kata Kunci:

BUMDes
Kebijakan Publik
Strategi Pelaksanaan
Ekonomi Desa
Pendapatan Asli Desa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pelaksanaan kebijakan serta faktor penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan kebijakan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat berperan penting pada masyarakat. Meskipun demikian, terdapat faktor yang menghambat strategi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ialah kurangnya modal dari pemerintah kabupaten, kurangnya dukungan dari Surat Keputusan kerjasama antara pemerintah dan pengusaha besar untuk menyisihkan sebagian modal untuk pengembangan usaha Mitra Usaha yang telah berkolaborasi dengan BUMDes dan kurang bisa bersaing dengan produk lain dari segi kuantitas atau jumlah produk yang bervariasi karena karena mempunyai modal usaha yang sangat terbatas. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan terkait pengelolaan BUMDes.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pelaksanaan kebijakan serta faktor penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan kebijakan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat berperan penting pada masyarakat. Meskipun demikian, terdapat faktor yang menghambat strategi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ialah kurangnya modal dari pemerintah kabupaten, kurangnya dukungan dari Surat Keputusan kerjasama antara pemerintah dan pengusaha besar untuk menyisihkan sebagian modal untuk pengembangan usaha Mitra Usaha yang telah berkolaborasi dengan BUMDes dan kurang bisa bersaing dengan produk lain dari segi kuantitas atau jumlah produk yang bervariasi karena karena mempunyai modal usaha yang sangat terbatas. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan terkait pengelolaan BUMDes.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (6) didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa ini didirikan dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Keberadaan BUMDes menjadi salah satu pertimbangan penting untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa dalam pengelolaan potensi desa serta BUMDes menjadi usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. BUMDes berperan dalam mendukung kemandirian ekonomi desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat dijadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belajar dari kurang efektifnya pelaksanaan program yang sudah ada, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian diperdesaan adalah melalui penyatuan pengelolaan kelembagaan ekonomi yang sudah ada. Aset ekonomi yang sudah ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa.

Penelitian yang relevan dari (Zulkarnain Ridwan, 2014) menunjukkan bahwa Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 telah menjadi pengaturan yang komprehensif tentang desa. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengaturan mengenai BUMDes dalam Undang-Undang Desa yang baru ini lebih lengkap. BUMDes tetap diposisikan sebagai suatu Lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintah desa. Tata Kelola yang profesional dengan mengacu pada pedoman pembentukan BUMDes berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi prasyarat berjalannya BUMDes secara baik. Dengan demikian, kegiatan BUMDes yang profesional dan ideal dapat menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional.

Selain itu, studi oleh (Amelia Sri Kusuma Dewi, 2014) mengungkapkan bahwa adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya membawa dampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan keinginan memajukan desa. Inisiatif itu harus melihat pada banyak aspek meliputi pelayanan, demokratisasi, dan partisipasi serta hal yang lebih penting adalah meningkatkan potensi ekonomi desa.

Menurut penelitian (Hasyim, et. al., 2021) bahwa BUMDes Ciaro Maju di desa Ciaro sudah menyentuh pada ranah potensi ekonomi desanya yaitu perekonomian pertanian, perkebunan, dan persawahan walaupun belum maksimal. Selain itu, BUMDes Desa Ciaro juga berfokus pada pengembangan layanan jasa kepada masyarakat desa yang membutuhkan

seperti pelayanan jasa internet, pembayaran online dan layanan gedung serba guna serta digital printing.

BUMDes terbukti menjadi bagian dari peningkatan ekonomi masyarakat baik dalam aspek pelayanan, demokratisasi, dan partisipasi. Peningkatan ekonomi desa hendaknya dimulai dengan memberikan legalitas yang tepat sehingga BUMDes benar-benar membuktikan perannya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) serta menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh.

Penelitian ini menganalisis salah satu program BUMDes yaitu UMKM. Potensi dari unit ini sangat besar dan prinsip menjalankan program ini meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, UMKM Kabupaten Maros belum berjalan dengan baik karena adanya beberapa faktor yang menghambat yaitu Faktor Anggaran dan Faktor SDM. Pengelolaan program BUMDes ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian maka setiap program yang telah dirancang dan dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat setempat, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan desa serta literatur terkait. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Objek penelitian ini dilaksanakan pada Desa Tukamasea Kecamatan Bantimurung yang ada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Ruang lingkup penelitian meliputi pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimiliki oleh Desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan publik khususnya yang terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan kebijakan BUMDes "Karya Bersama" memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD).

BUMDes ini mengelola berbagai unit usaha, antara lain:

- Unit Perdagangan: Mengelola rumah toko yang menyediakan kebutuhan rumah tangga, alat tulis, serta layanan BRI Link.
- Unit Jasa Keuangan: Menyediakan layanan simpan pinjam untuk membantu masyarakat dalam memperoleh modal usaha.
- Unit Usaha Penyewaan: Menyediakan perlengkapan seperti tenda, kursi, dan sound system.
- Unit Pariwisata: Mengembangkan Wisata Dolli yang hasilnya digunakan untuk beasiswa dan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

Pendapatan BUMDes "Karya Bersama" mengalami peningkatan setiap tahun, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1, terlihat bahwa pendapatan BUMDes terus meningkat, yang menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial berupa beasiswa dan sembako juga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mendukung program BUMDes.

Faktor Penghambat

Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi strategi kebijakan BUMDes meliputi:

- Terbatasnya Modal Usaha: Dukungan modal dari pemerintah kabupaten masih kurang, sehingga ekspansi usaha menjadi terbatas.
- Kurangnya Regulasi Kerja Sama: Tidak adanya surat keputusan kerja sama dengan pengusaha besar menghambat pengembangan mitra usaha.
- Keterbatasan SDM: Kurangnya kapasitas manajerial dalam mengelola unit usaha menjadi tantangan tersendiri.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan peningkatan PAD, BUMDes mampu menyediakan berbagai layanan sosial seperti beasiswa dan bantuan pangan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya dukungan modal dari pemerintah kabupaten dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha.

Sebagai solusi, diperlukan peningkatan modal usaha, regulasi yang lebih mendukung kerja sama dengan sektor swasta, serta pelatihan bagi pengelola BUMDes. Dengan strategi yang tepat dan dukungan kebijakan yang lebih kuat, BUMDes di Desa Tukamasea dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Tabel dan Grafik

Table 1. Data penghasilan Unit Usaha tahun 2021 - 2024

No	Uraian	Laba 2021	Laba 2022	Laba 2023	Laba 2024
1	Pendapatan Unit Usaha Perdagangan	24.670.000	30.214.000	30.614.000	24.545.000
2	Pendapatan BRI Link	6.506.000	14.050.000	10.750.000	15.200.000
3	Pendapatan Unit Usaha Parawisata	111.467.492	117.734.000	176.783.600	175.607.840
4	Pendapatan Unit Usaha Jasa Sewaan	4.504.000	4.110.000	3.178.000	4.250.000
5	Pendapatan Jasa Keuangan	4.913.000	4.488.000	4.100.000	5.600.000
6	Pendapatan Pupuk dan Mobil Sampah	-	-	-	1.200.000
Jumlah		152.060.492	170.696.000	225.426.208	226.402.840

Sumber: Kantor BUMDes Karya Bersama Desa Tukamasea 2024



Foto: Nahda Annisa (17/02/2025)

Foto 1. Proses Wawancara oleh Ketua BUMDes



Foto: Nahda Annisa (17/02/2025)

Foto 2. Proses Wawancara oleh Ketua Unit Usaha



Foto: Nahda Annisa (17/02/2025)

Foto 3. Kunjungan ke Unit Usaha Perdagangan yang diadakan oleh BUMDes

D. SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa BUMDes "Karya Bersama" telah berkontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat Desa Tukamasea melalui diversifikasi usaha dan pemanfaatan sumber daya lokal. Namun, terdapat kendala yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas BUMDes.

- Peningkatan Modal Usaha: Pemerintah daerah perlu menambah alokasi dana guna memperluas unit usaha yang dikelola BUMDes dan meningkatkan daya saing mereka.
- Penguatan Regulasi dan Kebijakan: Perlunya peraturan yang lebih jelas mengenai kerja sama antara BUMDes dan sektor swasta, sehingga investasi dalam pengembangan unit usaha dapat lebih optimal.

- Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Diperlukan pelatihan manajerial dan teknis bagi pengurus BUMDes untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola usaha secara profesional.
- Peningkatan Akses Pasar: BUMDes perlu memperluas akses pemasaran dan distribusi produk mereka agar dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional.

Dengan implementasi strategi yang lebih terstruktur dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan BUMDes "Karya Bersama" dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Desa Tukamasea.

Ucapan Terima Kasih*

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Bapak Dr. H. Aras Solong, M.Si dan Ibu Hj. Hawatiah yang telah memberikan doa kepada peneliti. Kakakku tercinta Dzulqarnain, ST.,M.Si dan Rizki Sri Mardani, SE. yang telah memberikan doa kepada peneliti. Sahabat-sahabatku tercinta Gadis-gadis manja yang selalu mengisi hari-hari penulis yang sangat menyenangkan dan turut membantu serta memberikan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini. Sahabat-sahabat Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah banyak memberikan motivasi dan pelajaran selama penyelesaian studi kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir yang dibuat masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengalaman. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran, masukan, bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak lain, khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik. *Aamiin Yaa Rabbal Alamin.*

Kontribusi*

Dalam penyusunan artikel penelitian ini, banyak pihak yang telah memberikan motivasi, saran, dukungan, bahkan masukan yang sangat membantu peneliti. Pada kesempatan yang berharga ini, peneliti bermaksud menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak terutama kepada Prof. Dr. H. Muammar Bakry, Lc., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Makassar. Dr. Nahdiana, S. Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Makassar. Dr. Sahrudin Malik, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Islam Makassar. Dr. H. Aras Solong, M.Si selaku pembimbing yang telah berkenan memberikan ilmu dan solusi atas segala permasalahan dan kesulitan dalam pembuatan dan penulisan tugas akhir ini. Dr. Sahrudin

Malik, M. Si selaku dosen penguji yang telah berkenan mengarahkan dan membantu peneliti selama penyusunan tugas akhir ini serta memberikan tambahan ilmu dalam penulisan ini.

REFERENSI

- Ardana, Komang. dkk. (2009). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Graha
- Anif, Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga.
- Aurrahmah, A. Nazaki, & Handrisa. (2018). Strategi Pengembangan BUMDes di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan 2.
- Amelia. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. 5 (1). <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/viewFile/914/878>
- Batlajery, S. (2016). Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke. 5 (2), 135–155. <https://www.neliti.com/id/publications/163091/penerapan-fungsi-fungsi-manajemen-pada-aparatur-pemerintahan-kampung-tambat-kabu>
- Efendi, Syahrul. (2019). Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6 (4). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3102>
- Fitriska, Kateria. (2017). *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Fitriska, Kateria. (2017). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, Vol. 5 No. 2.
- Hennidar P, A. Lena, S. (2017). *Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pengelolaan Potensi Wisata Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten*. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta
- Hasyim. (2021). Peranan Bumdes Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ciaro Kecamatan Nagreg kabupaten Bandung. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*. 12 (1), 40-51. <https://jurnal.fisip.uniga.ac.id/index.php/jpkp/article/download/120/102/310>
- Mariati, Rahman, Hj. (2017). *Ilmu Administrasi*. Makassar: CV. Sah Media.
- Husein, Umar. (2010). *Riset Pemasaran dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Maryuani. (2008). *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Novanda, R. (2019). *Buku Jejak Sukses Desa Membangu BUMDes*. Jakarta: 81 Pusdatin Balilaflo.
- Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 *Tentang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*.
- Permen No. 39 Tahun 2010 *Tentang Badan Usaha Milik Desa*.

- Rivai, V. Mulyadi, D. (2011). *Kepemimpinan dan perilaku organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridlwan, Zulkarnain. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/314/273/934>
- Syahza, Almasdi, Suarman. (2013). Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14 (1), 126-139. [https://fkip.unri.ac.id/wp-content/uploads/2019/03/Strategi-Pengembangan-DaerahTertinggal-Dalam-Upaya-Percepatan Pembangunan-Pedesaan-2013.pdf](https://fkip.unri.ac.id/wp-content/uploads/2019/03/Strategi-Pengembangan-DaerahTertinggal-Dalam-Upaya-Percepatan-Pembangunan-Pedesaan-2013.pdf),
- Sulaksana, J. Nuryant, I. (2019). Strategi pengembangan badan usaha milik desa (bumdes) kasus di bumdes mitra sejahtera desa cibunut kecamatan argapura kabupaten majalengka. 3, 348–359.
- Salusu, J. (2008). *Pengambilan Keputusan Strategi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Seyadi. (2003). *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM
- Suci, R.P. (2015). *Esensi Manajemen Strategi*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Sugiyono. (2011). *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjokrowinoto, M. (1992). *Birokrasi Pembangunan Masyarakat, dalam Effendi, S., et al., Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa*.
- Widarta, I. (2001). *Cara Mudah memahami Otonomi Daerah*. Yogyakarta: LAPERA. Pustaka Utama.